

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari daerah yang bersangkutan. PAD diperoleh dari sumber-sumber yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika PAD dapat terealisasi dengan baik, maka dapat dikatakan bahwa keuangan daerah tersebut juga baik.

Keuangan daerah baik jika daerah tersebut mampu menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhan keuangan daerahnya tanpa harus menggantungkan diri pada bantuan dana dari pemerintah pusat/daerah yang lebih tinggi. Salah satu sumber keuangan daerah yang dapat digali adalah pajak daerah.

Pajak daerah merupakan sumber kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan daerah yang berguna untuk pembiayaan daerah tersebut. Penerimaan Pajak Daerah berasal dari berbagai macam, salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pajak Kendaraan Bermotor menimbulkan banyak masalah dalam proses pemungutannya. Salah satu masalah utamanya adalah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor. Secara umum tunggakan pajak adalah pajak yang belum dilunasi pada saat pengenaan denda. Tunggakan pajak tersebut dikarenakan wajib pajak yang belum membayar pajak pada saat jatuh tempo. Hal ini memicu kurang optimalnya penerimaan PAD.

Menurut penjelasan Hendri Santoso selaku kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Jawa Tengah dalam Solopos.com Semarang, Jepara menduduki peringkat kedua dalam sepuluh besar tunggakan pajak tertinggi Jawa Tengah pada tahun 2016. Tunggakan pajak di Jepara saat itu mencapai 72,15 Milyar. Dengan adanya kondisi tersebut, mempengaruhi penerimaan pajak daerah sehingga Pendapatan Asli Daerah menjadi tidak optimal. Namun dalam hal ini, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan penambahan titik pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yaitu dengan mengadakan Samsat Keliling, Samsat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN), Samsat Gerai, dan SAKPOLE. Hal ini ditujukan agar wajib pajak mudah dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Tri Mustika Sari (2013) berpendapat penerimaan Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Reza Primansyah (2013) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh Pajak Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat. Kemudian penelitian dilakukan oleh Ayu Triani Utama (2014) yang meneliti bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dipengaruhi oleh jumlah penduduk, jumlah kendaraan, dan PDRB sektor transportasi. Septiani Hanipah dan Dudi Pratomo, SET.,M.Ak (2015) bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh efektivitas pajak, efisiensi pajak, dan kontribusi PKB. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Margaretha Anggraini, Anton Arisman, dan Christina

Yunita (2016), penerimaan Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh kontribusi PKB dan kontribusi BBNKB.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu diketahui masih ada hasil penelitian yang berbeda seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Reza Primansyah (2013) yang menyatakan dari hasil penelitiannya bahwa Pajak Kendaraan Bermotor roda dua dan roda empat tidak mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan pada hasil penelitian yang lain menyatakan bahwa PKB berpengaruh positif terhadap PAD.

Dari perbedaan penelitian di atas, peneliti ingin mencoba kembali meneliti pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan cara yang berbeda. Pada penelitian sebelumnya hanya meneliti pengaruh PKB terhadap PAD. Namun dalam penelitian ini akan lebih difokuskan pada hasil penambahan titik layanan pembayaran PKB yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam mengatasi tunggakan pajak terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Adapun penambahan titik layanan pembayaran PKB yang akan diteliti adalah Samsat Induk, Samsat Keliling, dan Samsat Paten. Ketiga titik layanan tersebut akan dijadikan variabel independen karena ketiga titik layanan tersebut ramai di datangi wajib pajak untuk membayar PKB, sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui seberapa besar pengaruh ketiga titik layanan tersebut terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, penulis berminat melakukan penelitian di kantor Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Jepara dengan judul **“Pengaruh Penambahan Titik Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan**

## **Bermotor (PKB) Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang Dikelola oleh UPPD Kabupaten Jepara”.**

### **1.2. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh penambahan titik layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah, sehingga ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada :

1. Fokus penelitian pada Pendapatan Asli Daerah yang dipengaruhi oleh penambahan titik layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Samsat Induk, Samsat Keliling, dan Samsat Paten. Pendapatan Asli Daerah yang diteliti dibatasi pada PAD yang dikelola oleh UPPD Kabupaten Jepara yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Retribusi Daerah yang meliputi penyewaan tanah/ruang di UPPD Kabupaten Jepara, dan pendapatan lain-lain yang bersumber dari denda PKB dan BBNKB.
2. Penelitian ini dilakukan di Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Jepara
3. Data penelitian tahun 2016-2018

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan permasalahannya adalah :

1. Bagaimana pengaruh pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Samsat Induk terhadap Pendapatan Asli Daerah?



2. Bagaimana pengaruh pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Samsat Keliling terhadap Pendapatan Asli Daerah?
3. Bagaimana pengaruh pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Samsat Paten terhadap Pendapatan Asli Daerah?
4. Bagaimana pengaruh pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Samsat Induk, Samsat Keliling, dan Samsat Paten terhadap Pendapatan Asli Daerah?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari perumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Samsat Induk terhadap Pendapatan Asli Daerah
2. Menganalisis pengaruh pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Samsat Keliling terhadap Pendapatan Asli Daerah
3. Menganalisis pengaruh pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Samsat Paten terhadap Pendapatan Asli Daerah
4. Menganalisis pengaruh pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Samsat Induk, Samsat Keliling, dan Samsat Paten terhadap Pendapatan Asli Daerah

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan serta bahan dalam penerapan ilmu metodologi penelitian, khususnya mengenai pengaruh inovasi pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui

Samsat Induk, Samsat Keliling, dan Samsat Paten terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh di perkuliahan dalam kenyataannya

### b. Bagi Peneliti Lain

Dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan untuk hasil penelitian yang lebih baik lagi .

### c. Bagi UPPD

Menambah semangat kerja untuk lebih giat lagi dalam untuk mencapai hasil pajak yang lebih optimal

### d. Bagi Masyarakat

Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu

